

T E S I S

**PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN
HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**



OLEH :

ANIS SADAH
NPM: 19310023

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

TE S I S

PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Diajukan oleh :

ANIS SADAH
NPM: 19310023

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANIS SADAH

NPM : 19310023

Alamat : Dukuh Kupang Utara I No.6, Surabaya.

No. Telp (HP) : 085232373394

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 01 Juli 2022

Yang Menyatakan,



ANIS SADAH
NPM: 19310023

T E S I S

**PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN
HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

Diajukan oleh :


ANIS SADAH
NPM: 19310023

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 11 januari 2022

Oleh

Pembimbing I


Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan keberlimpahan rahmat, karunia, serta kemampuan dan kreativitas sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" dengan baik.

Peneliti mengakui dan menyadari, bahwa tesis ini selesai dengan baik atas bimbingan, saran dan peran berbagai pihak yang cukup besar, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti dengan segala hormat menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister.
4. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I, bersama Dr. Suhandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan tesis dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Hukum Pada Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

6. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., dosen dan penguji tesis yang selalu memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi agar menyelesaikan tesis dan mendapatkan gelar Magister
7. Para penyintas kekerasan, anak-anak ABH, masyarakat marginal yang pernah saya damping, yang selalu memberi inspirasi kepada saya untuk tetap menggali serta meningkatkan kemampuan yang saya miliki yang merupakan anugerah dari Allah.
8. Mas Nonot Suryono, S.H. dan kawan-kawan Surabaya Children Crisis Centre, Andi ECPAT, kawan-kawan LBH PLATO, kawan-kawan di Kelompok Perempuan Pro Demokrasi, tempat saya berproses memahami hakikat keberadaan saya sebagai manusia, sebagai hambaNya.
9. Ibu, dan anak saya yang dengan doa serta dukungannya selalu ada, keluarga, serta kawan-kawan satu angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Akhir kata, harapan peneliti semoga tesis ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 01 Juli 2022

ANIS SADAH
NPM: 19310023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANIS SADAH

NPM : 19310001

Alamat : Dukuh Kupang Utara I No.6, Surabaya.

No. Telp (HP) : 085232373394

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 01 Juli 2022

Yang Menyatakan,

ANIS SADAH
NPM: 19310023

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Kerangka Konseptual	22
F. Metode Penelitian	46
G. Pertanggungjawaban Sistematis	49
BAB II PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014	51
A. Asas dan Tujuan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	51
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara Lainnya Untuk Memberikan Perlindungan Khusus Kepada Anak	52

C. Pasal Dalam UU Perlindungan Anak Yang Memuat Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Seksual	55
D. Ancaman Pidana Pada Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak	56
E. Undang-Undang Yang Memuat Tentang Pemberian dan Pelaksanaan Restitusi Untuk Anak Korban Kejahatan Seksual..	57
BAB III PROSEDUR YANG HARUS DILALUI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI	59
A. Hak Restitusi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual..	59
B. Prosedur restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	61
C. Peran LPKS Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual	66
D. Pendukung Maupun Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memperoleh Restitusi Ditinjau Dari Proses Restitusi Yang Diatur Didalam PP 43 Tahun 2017	70
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tesis yang berjudul Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bertujuan: *Pertama*, Untuk mengetahui bentuk perlindungan atas pemenuhan hak restitusi anak korban kejahatan seksual menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014; *Kedua*, Untuk memahami prosedur yang harus dilalui anak korban kejahatan seksual dalam memperoleh restitusi, berikut factor yang mendukung maupun yang menghambat.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian fokus untuk mengkaji dan melihat penerapan aturan, kaidah atau norma hukum positif. Penyusunan dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (sebagai bahan hukum yang utama) serta bahan hukum sekunder berupa .literatur-literatur, karya ilmiah hukum, bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, sumber bacaan dan data dari internet, serta dokumen hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang relevan dengan pembahasan selama penyusunan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *Pertama*: Secara tekstual UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan dan jaminan hak restitusi yang dibutuhkan oleh anak korban kejahatan seksual. Namun sifat dari perlindungan hukum pada hakikatnya adalah aktif dan progresif, mengikuti perkembangan sosial masyarakat yang juga selalu dinamis. Perlindungan tidak hanya pada terciptanya hukum secara tekstual tetapi juga bagaimana teks-teks hukum tersebut dijalankan sebagaimana fungsi hukum yang juga berkaitan dengan bekerjanya perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum juga menekankan pada pihak-pihak yang harus melindungi anak, itu berarti ketika terjadi kekerasan seksual seharusnya pihak-pihak yang diberi amanah dalam UU tersebut mempertanggung jawabkan kelalaian yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual. *Kedua*: Adanya prosedur untuk memperoleh restitusi ternyata tidak serta membuat anak korban kejahatan seksual meperoleh hak restisusi. Yang juga menjadi hambatan dalam memperoleh keadilan adalah tidak adanya juklak dan juknis pada aparat penegak hukum terutama di kepolisian dan kejaksaan untuk melaksanakan pemenuhan hak restitusi pada anak korban kejahatan seksual sebagai dasar permohonan maupun gugatan, karena selama ini masih menunggu permintaan atau permohonan dari pihak korban. Layanan LPSK untuk korban selama ini masih bersifat pasif dan terbatas di 25 ibu kota propinsi, sehingga tidak mudah dijangkau oleh korban. Sedangkan LPSK adalah lembaga yang memiliki potensi besar dalam menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban kekersan seksual memperoleh hak pemulihan secara maksimal dalam mendampingi korban memperjuangkan hak restitusinya.

Kata Kunci: hak restitusi; anak; korban kejahatan seksual

ABSTRACT

The thesis, entitled Protection of the Fulfillment of the Right to Restitution for Children Victims of Sexual Crimes based on Law Number 35 of 2014, aims to: First, to find out the form of protection for the fulfillment of the rights of restitution for children of victims of sexual crimes according to Law Number 35 of 2014; Second, to understand the procedures that must be passed by child victims of sexual crimes in obtaining restitution, along with the supporting and hindering factors.

The research method used in this thesis uses a normative juridical research method. That is, research focuses on examining and seeing the application of positive legal rules, rules or norms. The preparation is done by collecting data sources using primary legal materials, namely statutory regulations (as the main legal material) and secondary legal materials in the form of literatures, legal scientific works, scientific theoretical reading materials, reading sources and data from internet, as well as tertiary legal documents such as legal dictionaries and general dictionaries to provide explanations of concepts relevant to the discussion during the preparation of this research.

Based on the results of the study, it can be concluded: First: Textually the Child Protection Act has provided protection and guarantees for the right of restitution needed by child victims of sexual crimes. However, the nature of legal protection is essentially active and progressive, following the social development of society which is also always dynamic. Protection is not only in the creation of textual laws but also how these legal texts are carried out as well as legal functions which are also related to the operation of legal instruments. Legal protection also emphasizes the parties who must protect children, which means that when sexual violence occurs, the parties mandated in the law should be held accountable for negligence that causes children to become victims of sexual violence. Second: The existence of a procedure to obtain restitution does not mean that children who are victims of sexual crimes have the right to restitution. What also becomes an obstacle in obtaining justice is the absence of technical guidelines and technical guidelines for law enforcement officers, especially in the police and prosecutors to carry out the fulfillment of the right of restitution for children who are victims of sexual crimes as the basis for requests or lawsuits, because so far they are still waiting for requests or requests from the victims. LPSK's services for victims are still passive and limited in 25 provincial capitals, so they are not easily accessible to victims. Meanwhile, LPSK is an institution that has great potential in rescuing children who are victims of sexual violence to obtain maximum recovery rights in assisting victims in fighting for their right to restitution.

Keywords: *right of restitution; child; victims of sexual crimes*